



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

Yuk Keroyaan Atasi Banjir

Pemprov DKI, Pusat, dan Penyangga Harus Giatkan Kerja Sama

JAKARTA-Masalah banjir masih menjadi momok yang menakutkan bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bisa sendirian dalam mengatasi problem tahunan tersebut. Penanganan banjir yang sudah dilakukan bersama daerah-daerah penyangga ibu kota dan pemerintah pusat, bahkan harus ditingkatkan kembali.

Wali kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta. "Saya dan Pak Anies tetus berkordinasi mengupdate," imbuhnya, Selasa (6/2).

Sementara Anies mengatakan, dalam mengatasi banjir di ibu kota salah satunya perbaikan di hulu. Pemprov DKI harus bicara dengan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan volume air dari hulu ke Jakarta dapat terkendali. "Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) harus dipastikan tidak ada air yang spill over atau keluar dari aliran sungai," ujarnya.

Saat ini, lanjut Anies, penyebab banjir berbeda ketika beberapa waktu lalu ibu kota juga terendam banjir. Sekarang banjir yang menggenangi Jakarta akibat curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor, sehingga membawa kiriman air ke Jakarta. "Karena itu titik alirannya berbeda kalau yang sekarang umumnya di DAS Ciliwung," jelasnya.

Untuk masalah sampah, Gubernur Anies mengatakan, sampah turut menyumbang tertahannya air untuk sampai ke laut, sehingga membuat banjir di sejumlah daerah di ibu kota. "Kalau diperhatikan, banyak sampah dijaring di banyak tempat. Di atas di Kampung Melayu, di Cililitan ada lagi. Itu semua adalah usaha kami untuk bisa menjaring (sampah, Red) sebanyak mungkin," ujarnya.

Anies mengatakan, sebagian sampah yang berada di aliran sungai berasal dari sampah rumah tangga. Selain itu, terdapat pohon, bambu, dan tanah longsor sehingga aliran air terhambat.

Anies juga meminta masyarakat DKI mengubah kebiasaan membuang sampah di sungai karena berdampak pada penyumbatan. Efek sampah bisa mem-

berikan banjir yang berkepanjangan. Hingga kemarin, Pemprov DKI sudah berhasil mengangkat sekitar 1.500 ton sampah kiriman dari Bogor dan Depok di Jembatan Kampung Melayu, Jakarta-Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Acji mengakatakan, untuk mengangkat sampah tersebut sedikitnya dikerahkan 110 truk yang kemudian dibawa ke TPA Banjar Gebang, Bekasi. Selain di Kampung Melayu, pihaknya juga menyalurkan eskavator dari truk sampah di pintu air Manggarai dan kawasan dekat Season City Tambora, Jakarta Barat.

Mengenai bujet atau anggaran penanganan banjir pada tahun ini, Pemprov DKI sudah mengalokasikan sebesar Rp 3.473.734.507.410 atau Rp 3,4 triliun pada APBD 2018 (lihat grafis). "Kami melihat Gubernur Anies Baswedan sudah on the track dalam menjalankan program penanganan banjir," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik, Selasa (6/2).

Dia mengungkapkan, bukti penanganan banjir sudah tepat adalah perbaikan pompa air cepat selesai. Jika pada banjir Desember 2017 lalu ada pompa rusak, maka pada banjir Februari ini seluruh pompa sudah berfungsi optimal. Selain itu, titik banjir berkurang drastis. Contohnya di Jakarta Utara saja saya pantau tidak banjir. Lokasi banjir hanya wilayah bantaran sungai yang dilintasi air kiriman. "Itupun sejauh ini sudah dapat ditangani dengan baik. Para pengungsi juga sudah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan," katanya.

Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Ubaidillah menyampaikan bahwa anggaran Rp 3,4 triliun untuk banjir, lokasi peruntukan harus jelas. Apakah sebagai projek jangka pendek, menengah atau jangka panjang? Sehingga akan lebih teruktur kemajuan atau keberhasilan dalam penanganan banjir. "Kami akan ikut mengawasi penggunaan anggaran penanganan banjir tersebut," tandasnya.

Sementara pos anggaran terbesar penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air DKI yakni, untuk pembebasan lahan. "Tahun ini, anggaran Dinas Sumber Daya Air sekitar Rp 1,3 triliun untuk

pembelaan lahan," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendrarwan.

Dia mengatakan, pembelaan lahan itu berada di sepanjang garis sungai yang masuk program normalisasi yakni, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Lahan yang dibebaskan diprioritaskan kepada yang sudah beres administrasi dan siap dibayarkan. "Sertifikat yang dintamakan. Kalau memang terkena trase normalisasi, giring juga kami bayar," ujarnya.

Di lain pihak, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah membangun infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan bekerja sama dengan Pemprov Jakarta, terutama dalam hal pembelaan lahan dan sosial kependudukan.

Beberapa infrastruktur telah rampung dikerjakan seperti penambahan jumlah pintu air di Manggarai dan infrastruktur lainnya dalam tahap konstruksi seperti Normalisasi Sungai Ciliwung, Sudiran Ciliwung dan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Sukamahi.

Penambahan pintu air meningkatkan kapasitas Pintu Air Manggarai dari 320 m3/detik menjadi 500 m3/detik. "Debit air yang meningkat akibat curah hujan tinggi juga disertai oleh sampah, tapi telah dilakukan pengangkatan sampah-sampah, sehingga aliran air bisa lebih lancar. Apabila sampah menumpuk dapat mengakibatkan backwater, sehingga dapat mengakibatkan limpahan dan menghambangi daerah di bantaran sungai," kata Dirjen Sumber Daya Air Kemen PU-PR Iraeni Santoso.

Dia menambahkan, pihaknya juga tengah menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19,5 km yakni, dari Pintu Air Manggarai hingga ke Jalan TB. Simatupang. "Sudah selesai 60 persen, sedangkan 40 persen lagi apabila ranahnya sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta akan kami selesaikan," tandasnya.

Adanya normalisasi akan mengembangkan lobat Kali Ciliwung dan alur sungai

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

Yuk Keroyaan Atasi Banjir

menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter. Kemudian dilakukan perkakatan dinding sungai, pembangunan tanggul yang dilengkapi dengan Jalan inspeksi di sepanjang sisi sungai sekaligus menjadi sempadan sungai dengan lebar 6-8 meter. Normalisasi akan meningkatkan kapasitas tampung air Sungai Ciliwung dari 200 m³/det menjadi 570 m³/det.

Pembebasan lahan juga masih menjadi kendala pemerintah dalam penyelesaian pembangunan Bendungan Ciliwung yang akan mengalirkan debit banjir Sungai Ciliwung sebesar 60 m³/detik ke Kanal Banjir Timur.

Selain di hilir, Kementerian PU-PR juga membangun Bendungan Sukarnihi dan Clawi (Cipayung) yang merupakan bendungan tipe kering (dry dam). Apabila sudah rampung, bendungan ini pada

musim kemarau akan kering dan baru akan digenangi saat musim hujan. Kedua bendungan memiliki daya tampung 8,13 juta meter kubik dan berfungsi menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango selama kurang lebih 4 jam dan mengalirkannya sebesar debit normal Sungai Ciliwung, sehingga aliran air yang masuk ke Jakarta dapat terkendali. (don/tan/jpmn/wolt)

